

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Simpan Pinjam Perempuan Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Kep No. 25 /Vii/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat” (Studi Desa Kebonagung, dan UPK Kec. Wonodadi Kabupaten Blitar) ini ditulis oleh Ilma Hamdani Aturrohmah, NIM. 1711143029, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, pembimbing Dr. Iffatin Nur, M.Ag.

Kata kunci: Bunga, Akad, Prinsip dan Tujuan,

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena pelaksanaan pinjaman bergulir SPP pada PNPM Mandiri dimana pada saat pelaksanaannya terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh ketua kelompok dan kurang memperhatikan pedoman-pedoman yang tertera dalam keputusan menko terkait dengan prinsip dan tujuannya, dan terdapat tambahan bunga ketika angsuran.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana fenomena pelaksanaan pinjaman bergulir SPP pada PNPM Mandiri Pedesaan didesa Kebonagung Kec. Wonodadi Kab. Blitar ? (2) Bagaimana pelaksanaan pinjaman bergulir SPP pada PNPM Mandiri Pedesaan didesa Kebonagung Kec. Wonodadi Kab. Blitar menurut Hukum Ekonomi Syari’ah? (3) Bagaimana pelaksanaan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perdesaan Keputusan NO. 25/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri?

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pinjaman bergulir SPP pada PNPM Mandiri berdasarkan hukum ekonomi syariah dan keputusan menko tentang pedoman umum PNPM Mandiri.

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Data-data diperoleh langsung dilapangan dengan cara mengamati proses pelaksanaan pinjaman bergulir SPP pada PNPM Mandiri dan mewawancara para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pinjaman bergulir SPP tersebut. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) fenomena pelaksanaan pinjaman bergulir SPP masih berjalan sampai sekarang. Dimana pada proses pengumpulan persyaratan atau tahap verifikasi adanya kecurangan, banyak nasabah yang tidak mengetahui akad yang digunakan pada pinjaman bergulir SPP serta pada saat pengangsuran terdapat tambahan atau bunga yang dijadikan sebagai syarat dalam pinjaman, pelaksanaan pinjaman bergulir SPP pada PNPM Mandiri dirasa kurang tepat sasaran dalam menyalurkan dana dengan alasan agar dana pinjaman tersebut dapat cair dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok yang berhutang. (2)

pelaksanaan pinjaman bergulir SPP pada PNPM Mandiri tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah khususnya pembahasan tentang akad, akad yang digunakan dalam pinjaman bergulir tidak jelas, padahal sudah jelas bahwa akad memiliki rukun dan asas yang harus diperhatikan dan juga terdapat tambahan bunga yang dijadikan sebagai syarat pada waktu pengangsuran bulanan, dan itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. (3) Sedangkan dalam Keputusan NO. 25/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandirin tujuannya program tersebut, rumah tangga miskin yang seharusnya dapat menikmati bantuan tersebut justru tidak mendapat bantuan tersebut sehingga masyarakat miskin merasa dirugikan dengan hal tersebut.

ABSTRACT

Thesis entitled "Revolving Loan Simpan Pinjam Perempuan In National Program Of Rural Community Empowerment In The Perspective Of Islamic Economic Law And Decree No. 25 / VII / 2007 About the General Guidelines of the National Program for Community Empowerment (Wonodadi Upon and Kebonagung Village Study, Wonodadi Subdistrict of Blitar Regency) "was written by Ilma Hamdani Aturrohmah, NIM. 1711143029, majoring in Islamic Economic Law, faculty of Shariah and Law Science, mentors. Dr. Iffatin Nur, M.Ag.

Keywords: interest, contract, principle and purpose

This research is motivated by a phenomenon of the implementation of revolving loan SPP in PNPM Mandiri where at the time of its implementation there are cheats made by the group leader and pay less attention to the guidelines contained in the ministerial decree related to the principle and purpose, and there are additional interest when installment.

The formulation of the problem in writing this thesis is (1) How the phenomenon of the implementation of revolving loan SPP in PNPM Mandiri Rural Village Kebonagung Kec. Wonodadi Kab. Blitar? (2) How is the implementation of SPP rolling loan to PNPM Mandiri Pedesaan in Kebonagung Village, Kec. Wonodadi Kab. Blitar according to Shariah Economic Law? (3) How is the implementation of revolving loan in PNPM Mandiri Perdesaan Decision of the minister of NO. 25 of 2007 About the General Guidelines of the National Program for Independent Community Empowerment?

The purpose of this research is to know the implementation of revolving loan of SPP in PNPM Mandiri based on Shari'ah law law and the Coordinating Ministerial Decree on General Guidelines of PNPM Mandiri.

In this study used qualitative methods. The data is obtained directly in the field by observing the implementation process of SPP rolling loan to PNPM Mandiri and interviewing the parties involved in the implementation of SPP rolling loan. The analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion.

The results showed that (1) the phenomenon of SPP rolling loan implementation is still running until now. Where in the process of collecting the requirements or the verification stage of the fraud, many customers who do not know the contract used in the revolving loan SPP and at the time of installment there is an additional interest or used as a condition in the loan, the implementation of revolving loan SPP on PNPM Mandiri felt less target in

disbursing funds on the grounds that the loan funds can be liquid and can be utilized by the indebted group. (2) the implementation of revolving loan of SPP in PNPM Mandiri is not in accordance with sharia economic law especially the discussion about contract, akad used in revolving loan is not clear, whereas it is clear that the contract has a pillar and the principle that must be considered and also there are additional interest that serve as conditions at the time of monthly unemployment, and it is an act that is prohibited by Allah SWT. (3) While in the Decree of the Minister of Transportation NO. 25 of 2007 on General Guidelines of the National Program for Community Empowerment Mandirin aimed at the program, poor households who should be able to enjoy the aid did not get the assistance so that the poor felt disadvantaged by it.